

## **MODUL 1**

### **SEJARAH LAHIRNYA IPS**

#### Pendahuluan

Modul ini merupakan modul pertama dari mata kuliah konsep dasar IPS. Tentu saja Anda telah memiliki pengetahuan sosial yang diperoleh dari kehidupan sehari-hari melalui pengalaman hidup sehari – hari dan dari pelajaran IPS pada waktu Anda masih belajar di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas.

Sebelumnya, modul ini diadopsi dari buku Konsep Dasar IPS yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Nursid Suraatmadja, dkk, yang telah diterbitkan dari Universitas Terbuka yang kemudian dilakukan pengembangan dengan menambahkan materi-materi dari bacaan yang lain yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mahasiswa PGSD Universitas Esa Unggul.

Dalam modul ini, Anda akan mempelajari sejarah lahirnya IPS secara umum dan perkembangan IPS di Indonesia. Dari bahan ini Anda diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Dapat menjelaskan secara kronologis sejarah IPS secara umum
2. Dapat menjelaskan secara kronologis perkembangan IPS di Indonesia

Penguasaan terhadap perkembangan IPS sangat penting bagi Anda sebagai guru SD. Untuk membantu Anda menguasai hal itu, dalam modul ini akan disajikan beberapa pertanyaan untuk didiskusikan secara mendalam.

Agar Anda berhasil dengan baik mempelajari modul ini, ikutilah petunjuk belajar berikut ini!

1. Bacalah dengan cermat pendahuluan modul ini sampai Anda memahami dengan benar apa, untuk apa dan bagaimana mempelajari modul ini
2. Bacalah sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci yang Anda anggap baru. Carilah dan baca pengertian kata-kata kunci dalam daftar kata-kata sulit modul ini atau dalam kamus yang ada pada Anda
3. Tangkaplah pengertian demi pengeritan dari isi modul ini malui pemahaman sendiri dan tukar pikiran dengan mahasiswa atau guru lain serta dengan tutor Anda
4. Mantapkan pemahaman Anda melalui diskusi mengenai pengalaman sehari-hari yang berhubungan dengan pengetahuan sosial dalam kelompok kecil atau secara klasikal pada saat tutorial.

#### **SEJARAH LAHIRNYA IPS**

##### **a. SECARA UMUM**

IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) berasal dari literatur pendidikan Amerika Serikat. Dalam bahasa Inggris IPS diartikan “Social Studies.” Istilah tersebut pertama kali digunakan sebagai nama sebuah lembaga yang diberi nama *Committee of Social Studies*. Lembaga ini merupakan wadah himpunan tenaga ahli yang mempunyai ketertarikan pada kurikulum ilmu-ilmu sosial di tingkat sekolah dan ahli – ahli ilmu sosial yang mempunyai minat yang sama.

Nama lembaga ini kemudian dipergunakan untuk nama kurikulum yang mereka hasilkan, yakni kurikulum social studies. Nama social studies makin terkenal ketika pemerintah mulai memberikan dana untuk mengembangkan kurikulum tersebut.

Pembahasan mengenai latar belakang lahirnya IPS akan dilihat dari dua aspek, yakni latar belakang **sosiologis** dan **pedagogis** dengan mempertimbangkan aspek kemasyarakatan dan ilmu-ilmu sosial yang dikaji dalam IPS.

### **Latar Belakang Sosiologis**

Tinjauan terhadap latar belakang sosiologis difokuskan pada tempat lahirnya IPS yang pada awalnya bernama *social studies*. IPS dengan nama social studies pertama kali digunakan dalam kurikulum sekolah Rugby di Inggris pada tahun 1827. Dr. Thomas Arnold, direktur sekolah tersebut adalah orang pertama yang berjasa memasukkan IPS (social studies) ke dalam kurikulum sekolah.

Latar belakang dimasukkannya IPS ke dalam kurikulum sekolah berangkat dari kondisi masyarakat Inggris pada waktu itu yang tengah mengalami kekacauan akibat revolusi industri yang melanda negara itu. Masyarakat dan peradaban Inggris terancam dekadensi, karena mekanisasi industri telah menimbulkan kesulitan besar bagi masyarakat Inggris, terutama kaum buruh.

Kaum kapitalis dan pemerintah yang kurang memperhatikan nasib kaum buruh yang mengakibatkan terjadinya pemerasan dan penindasan. Selain itu, di Inggris juga terjadi persaingan di kalangan buruh sendiri, yang menyebabkan hidup kaum tidak punya (*the haves not*) menjadi sangat menderita. Kehidupan antar kaum buruh dan antara buruh dengan majikan digambarkan oleh filsuf Inggris Thomas Hobbes sebagai *homo homini lupus bellum omnium contra omnes* (manusia adalah srigala bagi yang lain, mereka saling berperang).

Singkatnya, manusia menjadi kehilangan kemanusiaannya (dehumanisasi). Sebagai respon terhadap keadaan yang demikian ironis, Arnold memasukkan IPS ke dalam kurikulum sekolahnya. Upayanya kemudian ditiru oleh banyak sekolah lainnya, dan sekaligus menjadi awal berkembangnya IPS sebagai matapelajaran di sekolah.

Latar belakang munculnya IPS di Amerika Serikat berbeda dari Inggris. Setelah Perang Budak atau Perang Saudara antara penduduk Utara-Selatan (1861-1865), di Amerika terjadi kekacauan sosial. Masyarakat Amerika Serikat yang sangat beragam belum merasa menjadi satu bangsa. Segregasi sosial masih kental dan lekat dengan kehidupan masyarakat Amerika pada saat itu.

Sebagai respon atas keadaan masyarakat tersebut, para ahli kemasyarakatan Amerika Serikat mencari upaya untuk membantu proses pembentukan bangsa Amerika Serikat, antara lain dengan mengembangkan IPS sebagai jawaban atas situasi sosial. IPS dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, yang dipepori oleh sekolah-sekolah di negara bagian Wisconsin sejak 1892. Setelah dipelajari secara terus menerus sampai awal dasa warsa abad ke-20, pada tahun 1916 panitia nasional untuk pendidikan menengah Amerika Serikat menyetujui pengembangan dan pemasukan IPS ke dalam kurikulum sekolah.

Pada tahun 1935 terjadi polemic diantara kalangan intelektual Amerika Serikat ( AS ) mengenai Ilmu Pengetahuan Sosial yang lebih dikenal dengan *Social Studies*, kemudian hal tersebut dipublikasikan oleh Organisasi yang bernama *National Council for The Social Studies* (NCSS). tapi hal itu tidak berlangsung lama karena menurut L.Tildsley hal itu memberi tanda sejak awal pertumbuhannya bidang social studies dihadapkan kepada tantangan untuk dapat membangun dirinya sebagai suatu disiplin yang solid.

Defenisi tentang social studies menurut Edgar Bruce Wesley pada tahun 1937 (Barr, Bart dan Shermis, 1977:2) yaitu : *The social Studies are the social sciences simplified for pedagogical purpose*” Ilmu Sosial itu yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Yang meliputi, aspek–aspek, seperti ilmu, sejarah, ekonomi, politik, sosiologi, antropologi, psikologi, geografi, dan filsafat, yang praktiknya digunakan dalam pembelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi. Pada perkisaran tahun 1940 – 1950 NCSS mendapat serangan yang berkisar tentang perlu atau tidaknya Sosial Studies untuk remaja bersikap demokratis dan kritis, sehingga munculah sikap penekanan terhadap fakta – fakta sejarah dan budaya yang ada.

Namun pada tahun 1960 timbul satu gerakan akademis yang lebih dikenal dengan *the new social studies* yang dipelopori oleh sejarawan dan ahli – ahli ilmu social untuk mengembangkan proyek yang menciptakan kurikulum dan memproduksi bahan belajar yang sangat inovatif dan menantang dalam skala besar. Tapi sampai tahun 1970an hal itu belum juga terwujud, tapi jika kembali pada penuturan Barr dkk 1977 yaitu dua visi yang berbeda dalam *social studies* yaitu *citizenship education* ( pendidikan kewarganegaraan ) atau *social studies Education* ( Ilmu pendidikan sosial ) hal itu juga dipengaruhi oleh PD II.

Pada tahun 1955 terjadi terobosan yang besar, berupa inovasi oleh Maurice Hunt dan Lawrence Metcalf yang mencoba cara baru dalam pengintegrasian pengetahuan dan keterampilan ilmu social untuk tujuan *citizenship education*, mengubah program Sosial studies disekolah yang dahulunya *Closed Area* ( hal – hal yang tabu dalam masyarakat ) menjadi refleksi rasional dalam mengupayakan siswa dapat mengambil keputusan mengenai masalah – masalah public. Sehingga bisa melatih keterampilan reflektif thinking ( berfikir refleksi ) dan berfikir secara kritis.

Gerakan *the new social studies* pada tahun 1960 masih belum efektif dalam mengajarkan substansi perubahan sikap siswa, sehingga para sejarawan dan ahli – ahli ilmu social bersatu untuk meningkatkan social studies kepada higher level of intellectual pursuit yang melahirkan social science education.

Menurut Barr dkk, mendefinisikan *social studies* dalam beberapa bagian yaitu **Pertama**, *social studies* merupakan satu system pengetahuan yang terpadu, **kedua** misi utama social studies adalah pendidikan kewarganegaraan dalam suatu masyarakat yang demokratis, **ketiga** sumber utama konten social studies adalah social science dan humaniter, **keempat** dalam upaya penyiapan warga Negara yang demokratis terbuka kemungkinan perbedaan dalam orientasi, visi tujuan dan metode pembelajaran. diantaranya lahir visi, misi dan strategi social studies itu adalah

1. *Social studies taught as citizenship transmission*. Merujuk pada suatu modus pembelajaran sosial yang bertujuan untuk mengembangkan warga negara yang baik sesuai dengan norma yang telah diterima secara baku dalam negaranya.

2. *Sosial studies taught as social science*. Merupakan modus pembelajaran sosial yang juga mengembangkan karakter warga negara yang baik yang ditandai oleh penguasaan tradisi yang menitik beratkan pada warga Negara yang dapat mengatasi masalah-masalah sosial dan personal dengan menggunakan visi dan cara ilmunan sosial.
3. *Sosial studies taught as reflective inquiry*. Merupakan modus pembelajaran sosial yang menekankan pada hal yang sama yakni pengembangan warga negara yang baik dengan kriteria yang berbeda yaitu dilihat dari kemampuannya dalam mengambil keputusan

Jika dilihat dari definisi dan tujuan social studies maka terkandung beberapa hal, pertama *social studies* merupakan mata pelajaran dasar diseluruh jenjang pendidikan persekolahan, kedua tujuan utama mata pelajaran ini ialah mengembangkan siswa untuk menjadi warga Negara yang memiliki pengetahuan, nilai, sikap dan keterampilan untuk berperan serta dalam kehidupan berdemokrasi. Ketiga konten pelajarannya digali dan diseleksi dari sejarah dan ilmu – ilmu social. Keempat pembelajarannya menggunakan cara – cara yang mencerminkan kesadaran pribadi, kemasyarakatan, pengalaman budaya, perkembangan pribadi siswa.

Di awal tahun 1994 *the board of direction of the national council for the social studies* menerbitkan Dokumen resmi yang diberi nama *Expectations of Excellence: curriculum Standard for social studies*. Sebagai rambu-rambu dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan strategi baru Social Studies, NCSS (1994) menggariskan hal-hal sebagai berikut:

1. Program Social Studies mempunyai tujuan pokok yang ditegaskan kembali bahwa *civic competence* bukanlah hanya menjadi tanggung jawab *Social Studies*.
2. Program *Social Studies* dalam dunia pendidikan persekolahan, mulai dari taman kanak-kanak sampai ke pendidikan menengah, ditandai oleh keterpaduan “ ...knowlwdge, skill, and attitudes within and across disciplines (NCSS, 1994:3).
3. Program Social Studies dititik beratkan pada upaya membantu siswa dalam *construct a knowledge base and attitude drawn from academic discipline as specialized ways of viewing reality* (NCSS, 1994:4).
4. Program Social Studies mencerminkan “ ...*the changing nature of knowledge, fostering entirely new and highly integrated approaches to resolving issues of significance to humanity*” (NCSS, 1994:5).

Dokumen ini yang sedang mewarnai pemikiran praksis social studies di AS sampai saat ini. dalam dunia pendidikan NCSS juga menggariskan bahwa dalam pendidikan mulai dari Taman kanak – kanak sampai pendidikan menengah memiliki keterpaduan “ *Knowledge, Skills, and attitudes within and across disipliner* “, pada kelas rendah ditekankan pada social studies yang tidak mengikat atau bisa bertolak dari tema – tema tertentu.

## **Latar Belakang Pedagogis**

Di samping sebagai reaksi atas keadaan masyarakat, seperti di Inggris, Amerika, dan Indonesia, lahirnya IPS juga dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menyiapkan peserta didik agar menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab, yakni dapat mewujudkan kewajiban dan hak-haknya dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan mempelajari IPS, peserta didik diharapkan akan menjadi warga masyarakat yang tidak individualistik, yang hanya mementingkan kebutuhan sendiri, dan mengesampingkan kebutuhan orang lain atau warga masyarakat lainnya. Sebaliknya, mereka diharapkan menjadi warga masyarakat yang memiliki watak sosial yang selalu sadar bahwa hidupnya hanya dapat berlangsung bersama dan bekerja sama dengan orang lain, dan orang lain hanya mau hidup bersama dan bekerja sama bila mendapat perlakuan yang baik dari mereka.

Dalam kaitan ini, ilmu-ilmu sosial tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, karena sifat ilmiah yang dimiliki oleh ilmu-ilmu sosial tersebut. Peserta didik yang menjadi warga masyarakat, sementara mereka baru lulus dari jenjang pendidikan dasar dan menengah, memerlukan pengetahuan interdisipliner yang pragmatis dan praktis bagi kehidupan sosialnya.

Dalam teori pendidikan digambarkan bahwa peserta didik dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh menyeluruh. Dalam kehidupan, mereka tidak memisahkan suatu aspek kehidupan dari aspek kehidupan yang lain. Aspek geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik dan sosial lainnya tidak terpisahkan dalam kehidupan sosial seseorang, bahkan saling terkait dan berhubungan. Oleh karena itu, dalam menggambarkan keadaan masyarakat sebaiknya para guru menggambarkan keadaan masyarakat sebagai suatu kesatuan dan keutuhan.

Disiplin ilmu-ilmu sosial dipandang tidak mendukung prinsip pedagogis di atas, karena berbagai disiplin itu membawa masyarakat dalam keadaan terpisah-pisah. Pengajaran IPS juga lebih dekat dengan keadaan sekarang yang ada dalam lingkungan hidupnya. Dengan demikian tidaklah terlalu sukar bagi peserta didik untuk mengamati, menggambarkan dan memikirkannya, karena masih berada dalam jangkauan mereka, baik dari segi waktu maupun tempatnya.

Bahan dan materi IPS merupakan kenyataan hidup yang dialami oleh peserta didik saat ini (kontekstual). Peserta didik diharapkan tertarik dan berminat mempelajari IPS, karena mereka belajar dengan memperoleh pengalaman dari kehidupan mereka sendiri, dan pengalaman atas kehidupan nyata merupakan proses belajar yang paling baik. Dengan demikian, hasil belajar yang paling baikpun dapat diharapkan pula.

Pendapat lain menyatakan bahwa dengan IPS, pengajaran tentang kehidupan sosial dapat berlangsung secara lebih efisien, karena seluruh aspek kehidupan disajikan sekaligus. Dalam satu kali jangkauan, seluruh segi kehidupan dapat dipelajari oleh peserta didik. Kebenaran yang diperoleh peserta didik akan lebih besar pula, karena mereka tidak melihat masyarakat bagian per-bagian, tetapi menyeluruh.

Itulah latar belakang pedagogis dikembangkan IPS. Mengingat berbagai kemiripan dan kegunaannya bagi pembinaan masyarakat Indonesia, maka pengembangan IPS di dunia pendidikan di Indonesia merupakan kebutuhan

pedagogis sebagaimana halnya pengalaman di Inggris dan Amerika Serikat sebagai wahana pembinaan sikap sosial bagi peserta didik.

*b. LAHIRNYA IPS DI INDONESIA DAN PERKEMBANGANNYA*

Situasi masyarakat di Inggris pada tahun 1827, yaitu awal industri modern, mirip dengan keadaan masyarakat Indonesia dewasa ini. Industri sedang berkembang dan tanda-tanda dehumanisasi nampak pula di Indonesia. Di antara indikator yang menunjukkan kemiripan tersebut adalah terjadinya berbagai tindak kejahatan, seperti perampokan yang disertai pembunuhan, kurang terjaminnya kaum buruh, individualisme yang mulai menggerayangi masyarakat perkotaan, tindakan mengobryekkan para penganggur dan pencari pekerjaan melalui human trafficking, terdesaknya alat-alat produksi tradisional oleh alat produksi buatan negara asing, dan penumpukan kekayaan pada golongan minoritas.

IPS sebagai sebuah bidang keilmuan yang dinamis, karena mempelajari tentang keadaan masyarakat yang cepat perkembangannya, tidak lepas dari perkembangan. Pengembangan kurikulum IPS merupakan jawaban terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat yang akan mempelajarinya. Perkembangan IPS di Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa hal berikut.

1. Pengalaman hidup masa lampau dengan situasi sosialnya yang labil memerlukan masa depan yang lebih mantap dan utuh sebagai suatu bangsa yang bulat.
2. Laju perkembangan pendidikan, teknologi, dan budaya Indonesia memerlukan kebijakan pendidikan pengajaran yang seirama dengan laju perkembangan tersebut.
3. Agar output pendidikan persekolahan benar-benar lebih relevan dengan tuntutan masyarakat yang ia akan menjadi bagiannya dan materi yang dimuat dalam kurikulum atau dipelajari peserta didik dapat bermanfaat.

Segi lain yang menyebabkan dikembangkannya kurikulum IPS sebagai mata pelajaran wajib bagi setiap anak didik adalah menyiapkan mereka kelak apabila terjun ke dalam kehidupan masyarakat.

Sejak diberlakukan kurikulum tahun 1964 sampai kurikulum 1968, program pengajaran ilmu-ilmu sosial masih menggunakan cara-cara (pendekatan) tradisional. Ilmu sosial seperti sejarah, geografi (ilmu bumi) dan ekonomi masih disajikan secara terpisah. Sejumlah ahli menyadari bahwa sebenarnya sistem tersebut telah usang dan tidak relevan.

Terkait dengan pengembangan kurikulum IPS, seorang ahli pendidikan, guru besar pada IKIP Malang, Prof. Dr. Soepartinah Pakasi, dapat dianggap sebagai penganut sosial studies yang pertama di Indonesia. Pada tahun 1968 beliau menerapkan pola pengajaran sosial studies pada sekolah percobaan IKIP Malang yang dipimpinnya.

Dalam penerapannya, guru-guru social studies di sekolah-sekolah tersebut di samping diberi pedoman pelatihan keterampilan secara khusus juga didampingi oleh sebuah regu dosen jurusan sejarah, geografi dan ekonomi. Dalam lingkup nasional ide-ide untuk menerapkan pengajaran sosial studies mulai ramai

diperbincangkan sekitar tahun 1971/1972. Untuk menyongsong dilaksanakannya pengajaran social studies, telah dilaksanakan seminar- seminar sosial seperti “Seminar Sejarah” di Yogyakarta pada tahun 1971, “Seminar Geografi” di Semarang pada tahun 1972, dan “Seminar Kependudukan” di Bandung pada tahun 1973.

Pada tahun 1972, oleh Badan Penelitian Pendidikan (sekarang menjadi Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan = BP3K), di Jakarta diselenggarakan pertemuan para ahli pendidikan berbagai disiplin ilmu dari IKIP dan lembaga-lembaga lain untuk membahas masalah rencana pembaharuan kurikulum sekolah di Indonesia. Pertemuan tersebut menyepakati penerapan prinsip kerja kurikulum Broadfield untuk mata pelajaran ilmu-ilmu sosial, yaitu sistem kurikulum yang mengelompokkan mata pelajaran sejenis yang menjadi satu bidang studi. Disepakati pula untuk mata pelajaran kemasyarakatan (ilmu sosial) seperti sejarah, geografi, ekonomi dan lain-lain dikelompokkan (di padukan) dalam satu bidang studi dengan nama Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Istilah IPS untuk pertama kalinya muncul dalam Seminar Nasional Tentang Civic Education tahun 1972 di Tawangmangu, Solo. Ada 3 istilah yang muncul dan digunakan *interchangeably* (bertukar pakai) yaitu

1. Pengetahuan Sosial
2. Studi Sosial
3. Ilmu Pengetahuan Sosial

Pemaduan ilmu-ilmu sosial menjadi bidang studi IPS di terapkan pada Kurikulum 1974 untuk 8 buah proyek perintis sekolah pembangunan (PPSP) . Setahun kemudian nama bidang studi IPS resmi memperoleh status formal melalui pembakuan Kurikulum 1975 untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.

## **PERKEMBANGAN KURIKULUM IPS DI INDONESIA**

### **Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Kurikulum 1964**

Kurikulum 1964 merupakan kurikulum terakhir yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Orde Lama. Pada saat Kurikulum Tahun 1964 terdapat pertentangan antara kelompok komunis dengan rakyat Indonesia. Pertentangan itu kemudian berakhir dengan kegagalan Partai Komunis Indonesia melawan kekuatan rakyat Indonesia yang gigih mempertahankan kehidupan bangsa yang religius berdasarkan Pancasila.

Dalam struktur kurikulum pendidikan dasar tahun 1964 dikenal adanya dua kelompok mata pelajaran yakni kelompok dasar dan kelompok cipta. Kelompok dasar adalah kelompok yang terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang dianggap paling dominan dalam mengembangkan kepribadian siswa dan siswi sesuai dengan kualitas yang diharapkan dalam tujuan pendidikan nasional. Mata pelajaran kelompok dasar ini terdiri atas sejarah Indonesia dan geografi Indonesia. Kedua mata pelajaran ini memiliki peran penting dalam membina kualitas siswa dan siswi sebagaimana yang diharapkan. Lebih-lebih dalam suasana kehidupan politik bangsa baru yang memerlukan adanya identitas bangsa yang kuat. Mata pelajaran kelompok cipta adalah kelompok mata pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan

masyarakat di luar wilayah geografis Indonesia. Mata pelajaran kelompok cipta ini terdiri atas sejarah dunia dan geografi dunia. Kedua mata pelajaran ini merupakan bagian disiplin sejarah dan geografi yang mewakili pendidikan ilmu-ilmu sosial yang dimaksudkan dalam pembahasan ini.

Mata pelajaran sejarah dapat memberikan landasan yang kuat karena mampu memberikan gambaran tentang perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat di wilayah Nusantara. Sebagai contoh keberadaan kerajaan- kerajaan di Nusantara dapat dijadikan dasar legitimasi yang kuat untuk menyatakan keberadaan bangsa Indonesia. Demikian pula mata pelajaran geografi Indonesia yang dapat berperan sama dengan sejarah Indonesia. Wilayah Republik Indonesia sebagai kelanjutan wilayah Hindia Belanda merupakan sesuatu yang perlu dikenal dengan baik oleh generasi muda bangsa. Keanekaragaman pulau-pulau dan jumlah pulau yang banyak dapat membangkitkan kekaguman dan menjadi perekat bangsa. Dengan demikian, keberadaan mata pelajaran sejarah Indonesia dan geografi Indonesia dapat memberikan sumbangan yang sama besar dalam mengembangkan wawasan kebangsaan pada diri siswa dan siswi.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan Ilmu-ilmu social dianggap penting. Tujuan pendidikan yang ingin dicapai dalam kurikulum mengindikasikan bahwa pendidikan sejarah dan geografi tidak hanya diarahkan untuk membangun kesadaran kebangsaan pada diri siswa dan siswi, namun juga dirumuskan dalam upaya mengembangkan wawasan keilmuan yang cukup kuat. Artinya, mata pelajaran sejarah Indonesia, sejarah dunia, geografi Indonesia, dan geografi dunia diajarkan untuk mengembangkan wawasan dan cara berfikir yang sesuai dengan ciri khas kedua disiplin ilmu tersebut.

Berbeda dengan kurikulum pendidikan ilmu-ilmu sosial pada pendidikan dasar, pada kurikulum pendidikan menengah istilah yang digunakan untuk struktur kurikulum adalah kelompok dasar dan kelompok khusus. Kelompok dasar adalah kelompok mata pelajaran yang harus diambil semua siswa dan siswi. Sedangkan kelompok khusus adalah mata pelajaran yang hanya diambil oleh siswa dan siswi yang memasuki jurusan tertentu (pada waktu itu ada jurusan alam, sosial, dan budaya). Mata pelajaran pada kelompok dasar meliputi sejarah Indonesia dan geografi Indonesia. Sedangkan kelompok khusus adalah kelompok mata pelajaran yang merupakan pendalaman pada jurusan tertentu, seperti jurusan Ilmu sosial mempelajari mata pelajaran sejarah dunia, geografi dunia dan ekonomi. Jadi untuk kurikulum 1964 pada pendidikan menengah mata pelajaran sejarah, ekonomi dan geografi merupakan perwakilan pendidikan ilmu-ilmu sosial.

Dari bahasan didepan, jelas bahwa pendidikan ilmu-ilmu sosial dalam Kurikulum 1964 mendominasi pemikiran kurikulum saat itu. Meskipun di negara asal IPS (social studies), di Amerika Serikat, sudah terjadi perubahan mengenai ruang lingkup pendidikan ilmu-ilmu sosial, namun perubahan yang terjadi di Amerika itu masih bersifat lokal dan belum merupakan sesuatu yang bersifat nasional. Pada waktu itu para pemikir kurikulum di negara itu masih mendasarkan diri pada pendidikan sejarah dan geografi sebagai dasar utama pendidikan ilmu-ilmu sosial.

Hal ini, sejalan dengan pendapat beberapa ahli pendidikan ilmu-ilmu sosial, di antaranya Scriven. Scriven (1964:90) menulis bahwa sejarah, geografi, dan psikologi dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan pendidikan ilmu-ilmu sosial

yang bersifat korelatif dan integratif. Scriven juga mengemukakan bahwa geografi memiliki ruang lingkup kajian mengenai distribusi keruangan manusia dan pengaruhnya dalam skala besar terhadap dunia sehingga berbagai konsep, generalisasi, dan teori dari disiplin lain dapat dikembangkan di atasnya. Demikian juga sejarah dapat dijadikan dasar kedua karena sejarah membahas distribusi waktu dan hasil-hasil yang dicapai umat manusia sehingga mampu mendasari berbagai kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik umat manusia. Psikologi berkenaan dengan kajian mengenai organisasi internal keutuhan manusia sehingga dapat menjelaskan berbagai tindakan yang dilakukan manusia dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan budaya umat manusia. Scriven (1964) juga menggambarkan keterkaitan ketiga disiplin ilmu itu sebagai kaki tiga yang menopang ekonomi, sosiologi, antropologi, pemerintahan, dan etika dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Ia mengemukakan bahwa di atas ketiga kaki inilah dibangun pendidikan ilmu-ilmu sosial lainnya.

Pengaruh pendapat yang dikemukakan Scriven terhadap kedudukan pendidikan sejarah dan geografi dalam Kurikulum 1964 sukar ditentukan dan bukan tujuan pembahasan ini untuk membuktikan pengaruh tersebut. Lagipula, tidak keseluruhan pemikiran Scriven tersebut diterapkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan ilmu-ilmu sosial.

Suatu hal yang jelas, secara resmi suasana politik di Indonesia pada saat Kurikulum 1964 dikembangkan tidak menginginkan adanya pengaruh Amerika Serikat. Semangat politik bangsa Indonesia yang didominasi oleh ajaran MANIPOL-USDEK serta sikap anti Barat (terutama Amerika Serikat) tidak menghendaki adanya pengaruh tersebut. Apalagi pengaruh dalam pendidikan yang merupakan sesuatu yang peka dan menentukan kehidupan masyarakat dan bangsa pada masa depan dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Faktor lain yang turut berpengaruh dalam status pendidikan ilmu-ilmu sosial di Indonesia saat itu adalah perkembangan ilmu-ilmu sosial di tingkat perguruan tinggi di Indonesia masih terbelakang. Perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia meskipun banyak jumlahnya, namun ilmu-ilmu sosial belum banyak mendapat perhatian kecuali pada ekonomi. Anthropologi masih merupakan barang langka di banyak perguruan tinggi. Demikian pula sejarah, sosiologi, politik, dan geografi. Dengan demikian tuntutan akademik terhadap kurikulum sekolah di bawahnya, terutama pendidikan dasar dan menengah, belum kuat.

Kenyataan lain adalah perhatian utama para pengambil keputusan kurikulum, (pada waktu itu dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Dasar dan Menengah) belum mendasarkan diri pada pengembangan keilmuan yang lebih luas. Selain itu, kenyataan di lapangan dan teori menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum di tingkat persekolahan tidak selalu harus diupayakan untuk pengembangan keilmuan yang masih langka. Oleh karena itu mudah dipahami disiplin ilmu-ilmu sosial lain belum mendapat tempat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah.

Realitas lain adalah dampak kurikulum yang demikian bagi persiapan siswa dan siswi untuk pendidikan lanjutan di perguruan tinggi belum merupakan masalah besar. Tuntutan yang diajukan perguruan tinggi mengenai dasar-dasar keilmuan apa saja yang harus dikuasai siswa dan siswi di MA/SMA belum kuat dan jelas (sebetulnya sampai sekarang pun tuntutan itu tidak pernah jelas). Fakultas-fakultas

yang ada di perguruan tinggi tidak mengajukan persyaratan yang jelas mengenai mata pelajaran yang harus dipelajari siswa dan siswi di MA/SMA dan sejauh mana mereka harus menguasai mata pelajaran tersebut sebagai persyaratan masuk ke fakultas tertentu. Seperti keadaan sekarang, persyaratan yang diajukan perguruan tinggi sering terlalu umum yakni hanya berdasarkan jurusan/program khusus/program inti yang ditempuh siswa dan siswi sewaktu di MA/SMA. Mereka yang berminat ke fakultas kedokteran, alam, dan juga teknologi, harus berasal dari jurusan alam. Sedangkan jurusan sosial mempersiapkan mereka yang akan melanjutkan ke berbagai fakultas ilmu-ilmu sosial seperti ekonomi, sospol, dan psikologi (beberapa fakultas psikologi bahkan hanya menerima tamatan alam). Konsekuensinya, materi yang mereka pelajari di SMA tidak langsung menjadi dasar bagi materi yang akan mereka pelajari di perguruan tinggi.

Konsekuensi lain dari ketidakjelasan tuntutan perguruan tinggi adalah perguruan tinggi mengajarkan kembali apa yang sudah pernah dipelajari siswa dan siswi di MA/SMA. Hal ini disebabkan perguruan tinggi merasa bahwa materi yang dimaksudkan dianggap penting, sedangkan mereka tidak yakin bahwa materi tersebut sudah dipelajari di MA/SMA sebagaimana mestinya. Dalam situasi semacam ini tentu yang menjadi korban adalah siswa dan siswi yang diterima menjadi mahasiswa dan mahasiswi serta masyarakat. Siswa dan siswi terpaksa harus mempelajari kembali bahan yang sudah pernah mereka pelajari dalam tingkat kedalaman yang tidak berbeda (terutama untuk mata kuliah yang bersifat pengantar di perguruan tinggi).

### **Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Kurikulum 1968**

Sejalan dengan perkembangan politik bangsa pada saat itu, Kurikulum Tahun 1964 mengalami perubahan dengan terbitnya Kurikulum Tahun 1968. Dalam Kurikulum Tahun 1968 untuk pendidikan dasar dan menengah, pendidikan ilmu sosial masih tetap diwakili oleh pendidikan sejarah, geografi, dan ekonomi. Perubahan nama dari kurikulum sebelumnya adalah nama mata pelajaran civics pada kurikulum 1964 diubah menjadi kewarganegaraan. Beberapa waktu kemudian diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila dan terakhir disebut dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Kedudukan pendidikan ilmu sosial dalam Kurikulum 1968 tidak berubah dari kurikulum sebelumnya. Pendidikan sejarah Indonesia dan geografi Indonesia masih dalam mata pelajaran kelompok dasar, sedangkan ilmu sosial yang lain masuk dalam kelompok cipta atau khusus.

### **Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Kurikulum 1975**

Pengembangan Kurikulum Tahun 1975 merupakan awal baru dalam sejarah pengembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum ini tidak dikembangkan oleh Kementerian/Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tetapi oleh suatu lembaga di bawah kementerian tersebut yang dinamakan Pusat Pengembangan Kurikulum. Model pengembangan Kurikulum Tahun 1975 menjadi lebih jelas, baik dari segi pendekatan maupun tujuannya. Model pendekatan tujuan ini dikenal pula dengan

nama model Tyler dan mempunyai pengaruh yang besar di Amerika Serikat. Pada fase ini pengaruh pendidikan Amerika Serikat mulai menguat di Indonesia terutama melalui para sarjana yang pulang dari belajar di negara tersebut.

Selain model pengembangan, dalam kurikulum baru digunakan pula pendekatan pengembangan materi kurikulum yang berbeda dari kurikulum sebelumnya. Jika dalam kurikulum sebelumnya disebutkan nama disiplin ilmu-ilmu sosial sebagai nama mata pelajaran dalam kurikulum 1975 digunakan nama Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Dalam kurikulum dasar materi broadfile IPS meliputi disiplin geografi, sejarah, dan ekonomi sebagai disiplin utama. Untuk jenjang MI/SD mata pelajaran IPS menggunakan pendekatan sesuai dengan ide IPS, sedangkan untuk jenjang MTs/SMP menggunakan pendekatan terpisah. Untuk kurikulum IPS pada jenjang pendidikan menengah, materi IPS meliputi geografi dan kependudukan, sejarah, antropologi budaya, ekonomi dan koperasi, serta tata buku dan hitung dagang.

Dalam Kurikulum Tahun 1975 dinyatakan bahwa IPS adalah paduan (fusi) sejumlah mata pelajaran ilmu sosial. Dari batasan pengertian IPS, tampak bahwa definisi IPS yang digunakan pada Kurikulum Tahun 1975 sedikit berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Dalam definisi itu dikatakan bukan paduan dari sejumlah mata pelajaran ilmu sosial tetapi sejumlah mata pelajaran sosial. Pertanyaan yang dapat ditimbulkan kemudian ialah apakah pengertian mata pelajaran sosial sama maksudnya dengan pelajaran ilmu-ilmu sosial?

Dalam dokumen kurikulum yang disebut Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) yang dimaksudkan sebagai mata pelajaran sosial adalah disiplin ilmu-ilmu sosial. Untuk IPS pada jenjang pendidikan dasar disebutkan bahwa materi pelajaran IPS ditunjang geografi dan kependudukan, sejarah, dan ekonomi -koperasi, sedangkan untuk menengah IPS mencakup geografi dan kependudukan, sejarah, antropologi budaya, ekonomi dan koperasi, serta tata buku dan hitung dagang. Jadi, orientasi pendidikan IPS pada pendidikan disiplin ilmu jelas tergambar dalam dokumen kurikulum. Artinya, integrasi yang dimaksudkan adalah integrasi materi dari berbagai disiplin ilmu tersebut.

### **Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Kurikulum 1984**

Kurikulum Tahun 1984 merupakan penyempurnaan Kurikulum Tahun 1975. Dalam kurikulum 1984, nama IPS hanya digunakan untuk menyebutkan nama mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar MI/SD dan MTs/SMP, sama seperti dalam Kurikulum 1975. Disiplin ilmu yang dimasukkan dalam mata pelajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar (MTs/SMP) menjadi lebih luas dibandingkan dengan Kurikulum 1975. Disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, hukum, politik dijadikan materi baru bagi IPS. Dilihat dari jumlah disiplin ilmu yang tercakup, maka dapat dikatakan bahwa Kurikulum Tahun 1984 untuk IPS lebih maju jika dibandingkan dengan Kurikulum Tahun 1975.

Berbeda dengan mata pelajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar, untuk jenjang pendidikan menengah, nama IPS tidak lagi digunakan, melainkan disiplin ilmu sosial itu sendiri. IPS untuk jenjang pendidikan menengah diwakili mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, antropologi-sosiologi, dan tata negara. Setiap

disiplin ilmu yang disebutkan itu merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Dengan demikian tiap-tiap disiplin ilmu memiliki GBPP yang berbeda yang secara fisik terpisah dan isinya tidak berhubungan.

Selain itu, mata pelajaran ilmu-ilmu sosial tersebut berbeda dalam status kurikulum mereka. Ada yang dimasukkan ke dalam kelompok program inti dan ada yang dimasukkan menjadi kelompok program- pilihan. Program inti adalah program yang diberikan kepada semua siswa dan siswi, sedangkan program pilihan hanya diberikan kepada kelas atau jurusan tertentu.

### **Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Kurikulum 1994**

Kurikulum IPS Tahun 1994 adalah kurikulum yang akan digunakan pada tahun 1994. Seperti kurikulum sebelumnya, nama tahun digunakan bagi suatu kurikulum untuk menyatakan waktu mulai berlakunya. Sesuai dengan namanya, kurikulum ini mulai digunakan pada tahun 1994, yaitu pada tahun ajaran 1994/1995. Dalam Keputusan Mendikbud Nomor 060/U/1993 disebutkan bahwa pada jenjang pendidikan dasar terdapat mata pelajaran yang disebut ilmu pengetahuan sosial (IPS) yang mencakup ilmu bumi, sejarah (nasional dan umum), dan ekonomi. Walaupun kalangan ilmuwan geografi tidak sependapat dengan istilah ilmu bumi dan keduanya dianggap tidak sama, dalam kurikulum ini yang dimaksudkan dengan ilmu bumi adalah geografi yang dikenal dalam kurikulum sebelumnya. Selanjutnya, keputusan yang sama menunjukkan bahwa mata pelajaran IPS memperhatikan pengertian dasar dari konsep-konsep pendidikan disiplin ilmu sosial yang menjadi anggota IPS.

Keputusan tersebut menunjukkan bahwa IPS sebagai suatu nama mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar memiliki anggota disiplin ilmu yang sama dengan kurikulum sebelumnya. Demikian juga kajian terhadap rancangan GBPP memperlihatkan bahwa pendekatan pengajaran yang integratif hanya berlaku untuk jenjang pendidikan dasar di MI/SD, sedangkan untuk jenjang pendidikan dasar di tingkat MTs/SMP pendekatan disiplin ilmu terpisah (*separated disciplinary approach*) merupakan sesuatu yang tetap dominan. Bahkan, dalam rancangan GBPP tersebut dinyatakan bahwa geografi, sejarah, dan ekonomi masing-masing mendapatkan jatah 2 jam pelajaran per minggu. Artinya, GBPP IPS MTs/SMP menyatakan bahwa tiap anggota kurikulum IPS itu bersifat mandiri dengan tujuan, materi, dan juga jam pelajaran yang terpisah.

Bentuk pengajaran yang terpisah dan berdasarkan pendekatan disiplin ilmu itu terlihat secara jelas dalam setiap komponen GBPP (tujuan, pengalaman belajar, dan materi). Tampak di setiap kelas dan setiap catur wulan (sistem semester yang dianut Kurikulum 1984 diganti dengan satuan lama yaitu catur wulan, berlaku untuk pendidikan dasar, MI/SD dan MTs/SMP, serta pendidikan menengah MA/SMA). Komponen-komponen kurikulum untuk ketiga disiplin itu dijejerkan sehingga secara fisik terlihat dekat. Secara konseptual antara ketiganya tidak berhubungan.

Dalam GBPP disebutkan bahwa kondisi ideal mengajarkan IPS di MTs/SMP dan MA/SMA adalah setiap disiplin ilmu dalam IPS diajarkan oleh guru yang berbeda. Hanya dalam kondisi yang tidak memungkinkan ketiga disiplin tersebut diajarkan oleh guru yang sama. Anjuran yang demikian tidak saja memperkuat

kemandirian (ketiadaan hubungan antara ketiga disiplin itu dalam satu kurikulum yang sama), tetapi juga menunjukkan bentuk pendidikan ilmu- ilmu sosial yang diinginkan. Kiranya penggabungan ketiganya dalam satu kurikulum dengan nama IPS pada jenjang pendidikan MTs/SMP hanya untuk menghilangkan kesan padatnya materi kurikulum MTs/SMP dan untuk memperlihatkan keberhubungan semu dengan kurikulum IPS di MI/ SD.

Posisi kurikulum semacam ini kurang menguntungkan, bila pendidikan ilmu- ilmu sosial di MTs/SMP diajarkan dalam bentuk terpisah, karena akan menampilkan ketidak seimbangan antara apa yang didefinisikan sebagai IPS pada bagian awal GBPP dengan kenyataan materi kurikulum. Pengertian IPS dalam kalimat pertama jelas memperlihatkan adanya upaya untuk menggunakan bentuk pendidikan IPS yang korelatif, tetapi apa yang dikemukakan dalam kalimat berikutnya menunjukkan pendekatan yang digunakan dalam kurikulum IPS didasarkan pada pendekatan disiplin terpisah.

### **Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Kurikulum 2004**

Kurikulum 2004 untuk Pengetahuan Sosial memuat materi Pengetahuan Sosial dan Kewarganegaraan. Pengetahuan Sosial disatukan dengan Pendidikan Kewarganegaraan dipelajari siswa mulai dari kelas I sampai kelas IV SD. Pengetahuan Sosial, Sejarah dan Pendidikan Kewarganegaraan masuk ke dalam mata pelajaran Pengetahuan Sosial (IPS) diajarkan mulai kelas I sampai dengan kelas VI. IPS merupakan korelasi berbagai disiplin ilmu seperti Sosiologi, Antropologi, Sejarah, Ekonomi dan Koperasi, Geografi dan Politik kenegaraan dan sebagainya, merupakan "broadfield" antara Geografi, Sejarah, Ekonomi, dan Pengetahuan Kewarganegaraan.

Dari strategi belajar mengajar sampai kepada pelaksanaannya, memberikan keluluasan kepada guru agar mau dan mampu menentukan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi. Dari segi tujuan kurikuler untuk setiap kelas dari kelas I –VI masing-masing memiliki satu tujuan disebut Standar Kompetensi. Dari setiap standar kompetensi dikembangkan menjadi kompetensi dasar, hasil belajar indikator dan materi pokok. Dari segi lingkup bahan pengajaran menggunakan pendekatan spiral, yaitu pendekatan pembelajaran dimulai dari lingkungan yang terdekat dan sederhana sampai kepada lingkungan yang makin luas dan kompleks. Untuk sejarah pendekatan yang digunakan bisa menggunakan periodisasi yaitu penyampaian bahan pelajaran dimulai dari zaman kuno sampai dengan sejarah kontemporer, bisa juga menggunakan pendekatan *Flashback* dimulai dengan zaman sekarang menuju zaman yang terjadi pada masa lalu

Pengembangan materi semakin sederhana dan terfokus kepada kompetensi yang harus dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Materi yang disampaikan sediakan tetapi mendalam dan kontekstual (perampingan materi dan lebih simpel), komprehensif dan berkelanjutan. Kurikulum ini mengutamakan hasil disamping proses agar siswa memiliki kompetensi yang memadai atas pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan tujuan yang telah digariskan dalam kurikulum dan dalam pembelajaran. Secara konseptual

memberi ruang gerak kepada guru untuk mengemas dan mengembangkan materi pembelajaran yang berkualitas. IPS mengajarkan konsep-konsep dasar sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah dan kewarganegaraan melalui pendekatan pedagogis dan psikologis secara seimbang (*balance*).

Kurikulum Pendidikan IPS tahun 2004 dengan kurikulum 1994 hampir tidak jauh berbeda dimana keduanya memberikan peluang yang luas bagi guru sebagai pengembang kurikulum. Pengorganisaian materi IPS menggunakan pendekatan kemasyarakatan yang semakin meluas (ECA: Expanding Community Approach) yakni dimulai dari yang terdekat ke hal-hal yang lebih jauh (global) sehingga materi ilmu-ilmu sosial diambil dalam kehidupan sehari-hari yang langsung dapat diamati dan dipahami siswa. Pengorganisasian materi dimulai dari lingkungan terdekat sampai pada lingkungan terjauh, yaitu dari lingkungan keluarga, tetangga, sekolah, masyarakat sekitar, Indonesia, dan dunia. Materi yang disampaikan sedikit tetapi mendalam dan kontekstual (perampingan materi dan lebih simpel), komperhensif dan berkelanjutan.

Kompetensi siswa yang memadai atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap menjadi hal yang utama. Hal menyebabkan pendekatan penguasaan kompetensi tertentu, memberi penekanan yang besar pada penguasaan kompetensi (*skill*) atau aspek psikomotor dibanding aspek pengetahuan (*kognitif*). Hasil kompetensi siswa secara kongrit berupa produk, proposal, fortfolio, karya dsb. Dilihat dari aspek guru, guru dibebaskan dari tuntutan menyusun Prosedur Pengembangan Sistim Intruksional (PPSI). Guru bekerja secara mandiri dan tidak bergantung pada kurikulum, tetapi guru memiliki kreativitas dan fleksibel dalam pembelajaran di kelasnya. Secara konseptual memberi ruang gerak kepada guru untuk mengemas dan mengembangkan materi pembelajaran secara berkualitas, Menggunakan multimedia, mltimetoda dan multi sumber serta evaluasi, sehingga diharapkan anak akan merasa senang belajar IPS.

Penilaian menggunakan penilaian berbasis kelas yang diarahkan untuk mengukur pencapaian indikator hasil belajar. Selain penilaian tertulis, dapat juga menggunakan penilaian berdasarkan perbuatan, penugasan dan produk atau portofolio. Merujuk pada tuntutan Kurikulum Berbasis Kompetensi yaitu dengan menggunakan program "life skill" ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan kecakapan bagi lulusan sekolah disemua jenjang pendidikan.

Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan proses pembelajarn IPS di SD banyak bergantung pada penguasaan guru dalam menentukan tehnik/strategi yang dapat memberi peluang kepada siswa melakukan latihan-latihan melalui proses berpikir.

## **Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Kurikulum 2006**

Kurikulum 2006 atau dikenal dengan Model KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yakni model umum yang berisi kerangka acuan dan model kurikulum lengkap yang langsung diaplikasikan ke dalam satuan pendidikan. Kurikulum 2006 atau KTSP merupakan modifikasi dari model kurikulum yang sudah ada. Kurikulum ini memuat berupa standar isi dan standar kompetensi. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang

tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/diobservasikan untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan mata pelajaran.

Adapun yang menjadi ruang lingkup mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, dapat dilihat pada tabel Aspek dan Sub Aspek Ilmu-ilmu Sosial di bawah ini:

Tabel 1 Aspek dan Sub Aspek Ilmu-Ilmu Sosial

ASPEK	SUB ASPEK
1. Sistem Sosial dan Budaya	Individu, Keluarga, dan Masyarakat
	Sosiologi sebagai Ilmu dan Metode
	Interaksi Sosial
	Sosialisasi
	Pranata Sosial
	Struktur Sosial
	Kebudayaan
	Perubahan Sosial Budaya
2. Manusia, Tempat, dan Lingkungan	Sistem Informasi Geografi
	Interaksi Informasi Geografi
	Interaksi Gejala Fisik dan Sosial
	Struktur Internal Suatu Tempat/Wilayah
	Interaksi Keruangan
	Persepsi Lingkungan dan Kewajiban
3. Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan	Berekonomi
	Ketergantungan
	Spesialisasi dan Pembagian Kerja
	Perkoperasian
	Kewirausahaan
	Pengelolaan Keuangan Perusahaan
4. Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan	Dasar-dasar Ilmu Sejarah
	Fakta, Peristiwa, dan Proses

(Sumber: Kurikulum 2006)

Khusus melalui mata pelajaran IPS SD, merupakan standar kompetensi kecakapan hidup dan telah dibakukan dalam kurikulum 2006, meliputi:

a. Kecakapan Personal

Kecakapan ini meliputi beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berfikir rasional, memahami diri sendiri, percaya diri, bertanggung jawab untuk pembelajaran pribadi, dapat menghargai, dan menilai diri sendiri. Aspek akhlak mulia meliputi kemampuan pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai

keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan spriuial tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi sebagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.

b. Kecakapan Sosial

Kecakapan ini meliputi kompetensi bekerjasama dalam kelompok, menunjukkan tanggungjawab sosial, mengendalikan emosi, dan berinteraksi dalam masyarakat dan budaya lokal serta global. disamping itu siswa dapat meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sikap sportif, disiplin, kerja sama, dan hidup sehat.

c. Kecakapan Intelektual

Kecakapan ini meliputi kompetensi menguasai pengetahuan, menggunakan metode dan penelitian ilmiah, bersikap ilmiah, mengembangkan kapasitas sosial dan berfikir strategis untuk belajar sepanjang hayat, serta berkomunikasi secara ilmiah. Disamping itu siswa dapat memperoleh kompetensi lanjut akan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif, dan mandiri dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif, dan nilai-nilai untuk mengambil keputusan yang tepat.

d. Kecakapan vokasional

Kecakapan ini berkaitan dengan suatu bidang kejuruan/keterampilan yang meliputi keterampilan fungsional, keterampilan bermata pencaharian seperti menjahit, bertani, berternak, otomotif; keterampilan bekerja; kewirausahaan; dan keterampilan menguasai teknologi informasi dan komunikasi.

Lalu, bagaimanakah IPS dalam kurikulum 2006? IPS dalam kurikulum 2006 sebagai berikut:

- a. Pada kurikulum 2004 dinamakan Pengetahuan Sosial yang sudah terintegrasi dengan Bidang Studi PPKn atau disebut juga dengan Mata Pelajaran PKPS, sedangkan dalam kurikulum 2006 dinamakan Mata Pelajaran IPS (kembali lagi seperti pada Kurikulum 1994)
- b. Kurikulum 2006 merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan (sekolah)
- c. Sekolah/guru mempunyai kelulusan penuh untuk menjabarkan kompetensi menjadi beberapa indikator atau mengembangkan indikator sendiri
- d. Kurikulumm 2006 bersifat memberi rambu-rambu untuk menentukan materi kemudian pendalaman dan keluasan materi sepenuhnya ditentukan oleh guru. Di sini aspirasi setempat (Muatan Lokal) dapat dituangkan
- e. Lebih menuntut kreativitas sekolah/guru untuk menyusun model pendidikan yang sesuai dengan kondisi local
- f. Bahan kajian IPS untuk kelas I sampai III tidak diajarkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, tetapi diintegrasikan (dipadukan) ke dalam mata pelajaran yang relevan secara tematis

- g. Kurikulum IPS 2006 hanya memuat standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan hasil belajar, indikator, dan materi tidak tercantum. Hal ini menuntut guru dapat secara mandiri untuk mengembangkan indikator sendiri
- h. Metode mengajar, penilaian dan sarana pengajaran guru diharapkan dapat mandiri, mau dan mampu menentukan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi
- i. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi. Guru hendaknya memberikan inspirasi kepada peserta didik untuk mengembangkan diri
- j. Pengorganisasian materi menggunakan pendekatan kemasyarakatan yang meluas (*expanding community approach*) yakni dimulai dari hal-hal yang terdekat dengan siswa (keluarga) ke hal yang lebih jauh (global)
- k. Pembelajaran dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial menggunakan pendekatan terpadu (*integrated approach*) dan pendekatan belajar kontekstual untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan, sikap, serta keterampilan sosial. Pendekatan tersebut menggunakan metode *Inkuri, eksploratif, pemecahan masalah*.
- l. Dalam pembelajarn Ilmu Pengetahuan Sosial perlu didikuti dengan Praktik Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. Praktik belajar ini merupakan inovasi pembelajarn yang dirancang untuk membantu siswa agar memahami fakta, peristiwa, konsep, dan generalisasi melalui praktik belajar secara empirik, yang disebut dengan Praktik Kesadaran Lingkungan.
- m. Dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dapat menggunakn berbagai media yang mempunyai potensi untuk menambah wawasan dan konteks belajar serta meningkatkan hasil belajar.
- n. Penilaian Berbasis Kelas dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial diarahkan untuk mengukur pencapaian indikator hasil belajar.
- o. Alokasi waktu tiap komoetensi dasar dapat diorganisasikan guru sesuai dengan alokasi yang diperlukan.

### **Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Kurikulum 2013**

Salah satu ciri kurikulum 2013, khususnya untuk SD adalah bersifat tematik integratif. Dalam pendekatan ini, mata pelajaran IPA dan IPS sebagai materi pembahasan pada semua mata pelajaran. Prosesnya, tema-tema yang ada pada dua pelajaran itu diintegrasikan kedalam sejumlah mata pelajaran. Untuk IPA menjadi materi pembahasan pelajaran Bahasa Indonesia , Matematika, dll. Untuk IPS menjadi materi pembahasan pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dll.

Dalam Kurikulum 2013 memuat berupa kompetensi inti da kompetensi dasar.

#### **a. Kompetensi Inti**

Kompetensi Inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi Standar Kompetensi Lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu, gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang

harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran. Kompetensi Inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian *hard skills* dan *soft skills*. Kompetensi Inti dirancang dalam empat kelompok yang saling terkait yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan (Kompetensi Inti 1), sikap sosial (Kompetensi Inti 2), pengetahuan (Kompetensi Inti 3), dan penerapan pengetahuan (Kompetensi Inti 4). Keempat kelompok itu menjadi acuan dari Kompetensi Dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif.

b. Kompetensi Dasar

Kompetensi Dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari Kompetensi Inti. Kompetensi Dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran.

### Rangkuman

1. Ide IPS pertama kali muncul di Amerika Serikat yang adopsi dari nama sebuah lembaga yang bernama *committe of social studies*. Latar belakang Lahirnya IPS dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek sosiologis dan aspek pedagogis. Aspek sosiologis dilatarbelakangi oleh kondisi sosial masyarakat yang mengalami ketidakstabilan, bahkan kekacauan. Hal ini nampak pada pola interaksi antar lapisan masyarakat yang tidak harmonis, yang digambarkan dengan kehidupan kaum buruh dengan sesama buruh dan antara kaum buruh dengan majikan yang mempekerjakan mereka dalam masyarakat Inggris sebagai dampak dari revolusi industri.
2. Berbeda dari aspek sosiologis, aspek pedagogik lebih menekankan upaya mengatasi pembelajaran ilmu sosial yang belum menyentuh kehidupan riil peserta didik karena sifat ilmiah yang dimiliki oleh ilmu tersebut. Latar belakang sosiologis dan pedagogis tersebut kemudian melahirkan tiga tradisi pembelajaran IPS, yang masing-masing dengan urgensi yang berbeda. Ketiganya adalah 1) pembelajaran IPS sebagai transmisi kewarganegaraan, 2) pembelajaran IPS sebagai ilmu sosial, 3) pembelajaran IPS sebagai inkuiri yang reflektif.
3. Demikian juga yang terjadi di Amerika Serikat menggambarkan kondisi masyarakat yang kental dan lekat dengan segregasi sosial. Keadaan yang demikian itulah yang melatarbelakangi munculnya IPS sebagai solusi dari masalah yang dihadapi masyarakat pada waktu itu.
4. Pengembangan kurikulum IPS merupakan jawaban dari tuntutan kebutuhan masyarakat yang akan mempelajarinya. Perkembangan kurikulum IPS tampak mulai dari istilah yang digunakan pada setiap kurikulum, struktur kurikulum, dan isi materi yang dimuat dalam setiap kurikulum, serta pendekatannya.
5. Pada Kurikulum Tahun 1964 sampai 1968 digunakan istilah kurikulum pendidikan ilmu-ilmu sosial, dengan struktur kurikulum mata pelajaran

kelompok dasar dan kelompok cipta atau kelompok khusus untuk kurikulum tingkat MA/SMA . Mulai Kurikulum 1975 sampai 1994 menggunakan istilah IPS untuk penamaan kurikulum pada setiap jenjang, dengan struktur mata pelajaran inti dan tambahan untuk kurikulum MA/MA/ SMA

6. Isi materi yang dipelajari pada setiap kurikulum juga mengalami perkembangan. Pada Kurikulum Tahun 1964 – 1968, materi yang termuat dalam kurikulum IPS meliputi sejarah, geografi, ekonomi dan civics atau pendidikan moral Pancasila atau PPKn, sedangkan untuk Kurikulum Tahun 1975 kurikulum IPS memuat materi-materi ilmu sosial: sejarah, geografi, ekonomi koperasi, PPKn, dan tata buku dan hitung dagang untuk jenjang pendidikan menengah (MA/SMA). Pada kurikulum 1994 muatan materi kurikulum IPS untuk jenjang pendidikan menengah mengalami perkembangan dengan dimuatnya mata pelajaran sosiologi, antropologi, dan politik dengan pendekatan yang terpisah.
7. Pengembangan kurikulum ilmu-ilmu sosial menjadi IPS sejak tahun 1975 dilatarbelakangi oleh dua hal penting, yakni sejarah atau pengalaman hidup masyarakat yang labil dimasa lalu dan laju perkembangan teknologi ke depan yang perlu disikapi agar peserta didik yang dihasilkan relevan dengan kondisi yang akan dihadapi dalam masyarakatnya.
8. Kurikulum IPS 2006 hanya memuat standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan hasil belajar, indikator, dan materi tidak tercantum.
9. Salah satu ciri kurikulum 2013, khususnya untuk SD adalah bersifat tematik integratif sehingga IPS menjadi materi pembahasan pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dll.

## Daftar Pustaka

- Barr, R. Barth dan J.L. Shermis S.S, 1978. *The Nature of the Social Studies*. California: ETC Publications.
- Hasan, Hamid. 1996. *Pendidikan Ilmu Sosial*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Tenaga Akademik.
- Jarolimek, John., 1997. *Social Studies in Elementary Education*. New York: Macmilan Publishing Cp., Inc.
- Kemendikbud. 2013. Kurikulum 2013: Kompetensi Dasar.
- Marc, C. 1991. *Teaching Social Studies*. New York: Prentice Hall
- Rusdi, Muhammad. Dkk. 1983. *Pengantar Ilmu Pengetahuan Sosial*. Surabaya: Tim IPS FPIS IKIP Surabaya.
- Scriven, M. 1994. *The Structure of the Social Studies, dalam the Structure of Knowledge and Curirculum*. Chicago: Rand MacNally
- Sumaatmadja, Nursid. 1980. *Metodologi Pembelajaran IPS*. Bandung: PT. Alumni